



JURNAL

Pendidikan Sejarah Indonesia

Online ISSN: 2622-1837

JAVA INSTITUUT (1919-1940): PERAN LEMBAGA ILMIAH SEBAGAI UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN JAWA DAN KONTRIBUSI INTELEKTUAL LOKAL

Aris Dany Setyawan*, Lutfiah Ayundasari

aris.dany.2207316@students.um.ac.id*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang Nomor 5 Malang, 65155, Indonesia.

Article history:

Received 12 October 2025; Revised 1 November 2025; Accepted 5 December 2025; Published 21 December 2025

Abstract: *The consequences of the implementation of ethical politics in Indonesia have given birth to intellectuals who are adaptive to the development of science. The Java Instituut is one of the proofs of the advancement of science during the colonial period of the Dutch East Indies. This institution symbolizes the intellectual harmonization between the colonial and local classes in the orientation of promoting Javanese culture. This paper aims to seek an in-depth discussion of Java Instituut using a historical approach. In addition, this paper also aims to provide a description of the Java Instituut's efforts in promoting Javanese culture and the role of local figures in it. Thus, the historical method which includes the stages of topic selection, heuristic, verification, interpretation and historiography is considered appropriate to produce the desired research. The results of the study show that the Java Instituut is an institution proposed by Mangkunegara VII which was later ratified by the colonial government thanks to a motion in the First Java Cultural Congress in 1918. The Java Instituut's efforts in advancing Javanese culture are carried out through several activities such as Javanese cultural congresses, writing competitions, language congresses, magazine and newspaper publications as well as the establishment of cultural-based schools and facilities. Local intellectual figures are given an equal place in this institution both as researchers and cultural activists.*

Keywords: *Java Instituut; Ethical Politics; Javanese culture; scientific institutions.*

Abstrak: *Konsekuensi atas pelaksanaan politik etis di Indonesia adalah lahirnya kaum intelektual yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Java Instituut menjadi salah satu bukti majunya ilmu pengetahuan di masa kolonial Hindia-Belanda. Lembaga ini menyimbolkan adanya harmonisasi intelektual antara golongan kolonial dan lokal pada orientasi pemaian kebudayaan Jawa. Tulisan ini bertujuan untuk mengupayakan adanya pembahasan yang mendalam tentang Java Instituut dengan menggunakan pendekatan sejarah. Selain itu, tulisan ini akan memberikan penjabaran kaitannya upaya Java Instituut dalam pemaian kebudayaan Jawa serta peran tokoh lokal di dalamnya. Dengan demikian, metode sejarah yang meliputi tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi dirasa sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Java Instituut merupakan lembaga yang diusulkan oleh Mangkunegara VII yang kemudian*

disahkan oleh pemerintah kolonial berkat menjadi mosi di dalam Kongres Kebudayaan Jawa I tahun 1918. Upaya *Java Instituut* di dalam memajukan kebudayaan Jawa dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti kongres kebudayaan, lomba karya tulis, kongres bahasa, penerbitan majalah dan surat kabar serta pendirian sekolah dan fasilitas budaya. Di dalam *Java Instituut*, tokoh intelektual lokal diberikan kesempatan yang besar dalam pemajuan kebudayaan, baik sebagai pengkaji maupun penggiat budaya.

Kata kunci: *Java Insituut*; Politik Etis; kebudayaan Jawa; lembaga ilmiah.

PENDAHULUAN

Diaspora kolonial Eropa di Asia Tenggara mengalami dinamisasi di setiap era. Awal abad ke-20 menjadi babak baru bagi kolonialisme Belanda di Indonesia. Ricklefs (2007), mengistilahkan periode ini sebagai transformasi kolonialisme menuju arah yang mendasar. Orientasi yang awalnya berupa eksploitasi mulai berkurang dan digantikan oleh pernyataan-pernyataan keprihatinan atas penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Aksi ini kemudian memunculkan regulasi yang dikenal dengan istilah politik etis. Kebijakan yang sering diartikan sebagai ‘politik balas budi’ itu merupakan titik awal kemajuan bangsa Indonesia. Tawaran berupa edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan transmigrasi (perpindahan penduduk) berdampak pada mobilitas sosial yang drastis bagi masyarakat bumiputera. Pada permulaannya, Politik Etis muncul sebagai reaksi atas kecaman-kecaman terhadap parlemen Belanda seperti yang dituliskan oleh Douwes Dekker pada buku Max Havelaar. Meskipun ditujukan sebagai bentuk pengupayaan sumber daya manusia yang lebih progresif, praktik politik etis masih mengedepankan unsur keuntungan bagi Belanda (Susilo & Isbandiyah, 2018). Dengan demikian, “kemajuan” yang terjadi masih berada di dalam koridor aksi hegemoni pihak kolonial Belanda itu sendiri.

Van Deventer sebagai penggagas politik etis menganggap corak kolonialisme yang lebih humanis akan membawa dampak pada meningkatnya empati masyarakat tanah jajahan. Padahal, pada realitanya upaya ini menjadi celah bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui kaum terpelajar. Salah satu kebijakan politik etis berupa edukasi, nyatanya telah membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi kalangan bumiputera. Meskipun di dalam implementasinya masih dijalankan dengan segregasi-segregasi tertentu, pendidikan bentukan Belanda berdampak pada munculnya golongan sosial baru di kalangan pribumi (Fauzi et al., 2023). Sejalan dengan pendapat Abdullah (2017), yang menyatakan jika pelaksanaan pendidikan sebagai bagian dari praktik politik etis melahirkan kalangan elit intelektual. Lebih detail, Abdullah mengungkapkan jika kaum terpelajar di Hindia-Belanda sebagai elit modern dibebani tanggung jawab pada kepemimpinan sosial, birokrasi dan politik. Tidaklah mengherankan jika beberapa lulusan STOVIA seperti Soetomo, Wahidin Sudirohusodo, Suwardi Suryaningrat dan Tirta Adhi Suryo berani berdiri di depan organisasi-organisasi pergerakan yang menjadi cikal bakal lahirnya pergerakan dan kebangkitan nasional.

Praktik edukasi dalam politik etis mengacu pada beberapa revitalisasi dan perkembangan pendidikan yang lebih komprehensif. Revitalisasi yang pertama adalah menggeser konsep pendidikan lama yang dominan menginternalisasi Islam ke arah pendidikan yang lebih modern (Afandi et al., 2020). Gaya pendidikan Islam yang dianut kalangan bawah tidak terlepas dari

pengaruh perkembangan Islam di era sebelumnya. Berkat disponsori Ratu Wilhelmina sebagai Pemimpin Belanda, pendidikan yang diterapkan berkiblat pada gaya Eropa. Moda pembelajaran yang awalnya konvensional diubah menjadi lebih formal dan terstruktur. Hal ini tampak pada pembangunan sekolah-sekolah berjenjang dan berdiferensiasi seperti; HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) yang merupakan sekolah dasar untuk anak-anak pribumi, MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) setingkat sekolah menengah pertama, HBS (*Hogere Burgerschool*) yang merupakan sekolah menengah umum dan STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) sebagai kedokteran di Batavia (Poesponegoro et al., 2023). Pengaruh Belanda terhadap penyelenggaraan pendidikan begitu kuat terbukti dari penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Selain itu, aturan-aturan semacam ketentuan seragam, seleksi masuk sekolah hingga mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dikontrol penuh oleh pemerintah. Upaya intervensif ini muncul sebagai implementasi tujuan utama politik etis khususnya edukasi, yakni modal awal menghasilkan kaum terdidik sebagai tenaga kerja murah untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di bidang administrasi dan industri yang dikelola Hindia-Belanda (Sultani & Kristanti, 2020).

Terlepas dari sifatnya yang spekulatif dan kontradiktif, kebijakan politik balas budi pada ranah edukasi terus mengalami perkembangan. Salah satu wujudnya adalah dilibatkannya bumi putera (khususnya yang telah menempuh pendidikan yang tinggi) dalam kegiatan kajian ilmiah. Sebagaimana yang dituliskan oleh Fauzi et al (2023), upaya pengkajian ilmu pengetahuan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda di abad ke-20 mulai menarik partisipasi pribumi. Sebenarnya, penelitian seperti ini telah dilakukan jauh sebelum pemerintah Hindia-Belanda mendominasi kekuasaan. Kolonial Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles misalnya. Di dalam bukunya yang terkenal, *The History of Java*, Raffles mencatat penjelajahannya di Nusantara. Dari perjalanan dan penelitian yang dilakukannya di Bengkulu, ia dan rombongannya berhasil menemukan tanaman endemik yang dikenal dengan *Rafflesia arnoldi*. Sedangkan, di bidang sosial budaya, kebijakan Raffles di Jawa mampu membongkar keberadaan situs-situs sejarah, bahkan terjadi revitalisasi besar-besaran terhadap candi-candi sebagai monumental yang berharga (Jordaan, 2016). Tidak dapat dipungkiri jika penelitian yang dilakukan pihak kolonial menjadi sebuah upaya untuk mendalami pengetahuan tentang tanah jajahannya.

Para periode kolonial Hindia-Belanda, pengkajian semacam ini semakin massif, variatif dan terstruktur. Objek kajian yang sering diangkat sebagai topik utama adalah Pulau Jawa. Ketertarikan kolonial terhadap Jawa selain dipengaruhi faktor strategis pemerintahan dan ekonomi, secara sosio-kultural masyarakat Jawa bersifat heterogen, unik dan autentik. Apalagi ketika dihadapkan objek-objek kebudayaan. Penelitian kebudayaan menjadi hal penting bagi Belanda, mengingat perluasan kekuasaan kolonial didukung dua aspek penting. Pertama, adalah aspek fisik melalui perkuatan politik dan ekonomi. Sementara aspek kedua merupakan aspek non-fisik yang merujuk pada penguasaan kebudayaan (corak kehidupan masyarakat) (Gandhi, 2018). Melihat besarnya partisipasi kelompok Eropa dan bumiputera dalam mengkaji kebudayaan Jawa, maka untuk mengakomodasinya dibentuklah sebuah lembaga yang bernama Java Institut. 'Java' merujuk pada kata Jawa sedangkan 'Institut' dapat dimaknai sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pengkajian (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.). *Java Instituut* merupakan lembaga hasil usulan Mangkunegara VII dan berdiri berkat putusan dari mosi Kongres Kebudayaan Jawa 1918. Lembaga di bawah pemerintah kolonial ini berkonsentrasi pada pengkajian dan pemajuan kebudayaan Jawa. Menurut catatan

Belanda di dalam Majalah Djawa, *Java Instituut* memandang Jawa sebagai medan kajian bahasa, geografi dan etnologi. Pernyataan ini dapat dilihat pada mukaddimah majalah edisi I tersebut.

Heeft het Hoofdbestuur het plan opgevat een klapper te laten samenstellen van den inhoud van het tijdschrift Djawa. // Java-Instituut te vinden, ongetwijfeld van belang is te achten voor de beoefening van de taal-, land- en volkenkunde van Java.

Kepala Pimpinan (petinggi *Java Instituut*) telah menyusun rencana untuk menyusun isi majalah Djawa. // *Java Institute* tidak diragukan lagi penting untuk praktik bahasa, geografi, dan etnologi Jawa (Majalah Djawa, 1921)

Berbekal berbagai narasi di atas, kiranya *Java Instituut* memerlukan perhatian khusus sebagai topik penelitian sejarah. Pasalnya, selama ini narasi-narasi terkait politik etis di bidang pendidikan masih berkutat pada perkembangan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan segregatif. Padahal, politik etis juga mengatur pembentukan pusat lembaga-lembaga pengkajian ilmiah. Urgensi ini semakin mengemuka mengingat peran *Java Instituut* yang signifikan dalam dinamika perkembangan kebudayaan Jawa, sebagai salah satu representasi utama kebudayaan terbesar di Indonesia. Namun, kajian akademis mengenai *Java Instituut* masih terbatas, sehingga lembaga ini belum banyak terungkap secara mendalam dalam penelitian ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini ditulis untuk memberikan khazanah baru tentang salah satu peran lembaga penting di periode pergerakan kebangsaan, khususnya pemberlakuan politik etis. Di sisi lain, tulisan ini dimaksudkan untuk memperbaiki persepsi kebanyakan masyarakat yang menganggap jika masa pergerakan selalu erat dengan organisasi atau tokoh-tokoh semata. Pemilihan *Java Instituut* didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini memiliki upaya pemajuan kebudayaan Jawa yang luas dan khas, sehingga eksistensinya masih dapat ditelusuri hingga masa kini. Adapun pemilihan kurun tahun 1919 didasarkan pada tahun pembentukan *Java Instituut* melalui hasil putusan pemerintah kolonial, sedangkan 1940 mengacu pada batas akhir penerbitan majalah Djawa yang merupakan majalah terbitan *Java Instituut*.

Penelitian disusun dengan bertumpu pada hasil-hasil kajian sebelumnya yang menjadi dasar konseptual dan analitis. Salah satu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fauzi et al. (2023) dengan judul *Java Instituut: Implementasi Intelektual Lokal dan Kolonial dalam Memajukan Kebudayaan Sunda 1921-1941*. Penelitian tersebut memberikan jabaran tentang perkembangan *Java Institut* khususnya pada upaya pemajuan kebudayaan Sunda. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan substansi pembahasan yakni tentang *Java Instituut*. Akan tetapi, penelitian tersebut dimaksudkan untuk meninjau *Java Instituut* dalam kacamata dinamika kebudayaan Sunda. Sedangkan, penelitian ini mencoba mengambil langkah berbeda dengan menitikberatkan kajian pada relevansi *Java Instituut* dengan kebudayaan Jawa. Dengan demikian, kebaruan dari penelitian ini terletak pada sudut pandang atas substansi penelitian. Untuk mewujudkan tujuan penelitian, maka penelitian ini disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut; 1) Bagaimana sejarah berdirinya *Java Instituut*? 2) Bagaimana kiprah *Java Instituut* terhadap pemajuan kebudayaan Jawa? 3) Bagaimana peran kontribusi tokoh lokal di dalam *Java Instituut*? Rumusan masalah tersebut akan menjadi bekal dalam mengembangkan pembahasan di dalam artikel ini secara terstruktur.

METODE

Untuk menjabarkan sejarah *Java Instituut* baik dalam konteks politik etis maupun sebagai lembaga pemajuan kebudayaan Jawa, maka metode penelitian yang diterapkan di dalam proses

penelitian ini merujuk pada metode penelitian sejarah. Adapun metode penelitian sejarah yang digunakan terdiri atas lima tahapan yang meliputi; pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik kebasahan sumber), interpretasi (analitis dan sintesis) dan penulisan (historiografi) (Kuntowijoyo, 2018). Pemilihan topik dilakukan dengan mempertimbangkan periode sejarah yang ditentukan yakni masa pergerakan kebangsaan Indonesia (1908-1945). Pemilihan topik didasarkan pada pengetahuan penulis terhadap topik penelitian (kedekatan intelektual). Pengumpulan sumber dilakukan berbasis daring melalui beberapa situs. Sumber-sumber yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Majalah Djawa (majalah *Java Instituut*) dengan periode penerbitan yakni 1921-1930 dan 1931-1940 dari situs *colonial architecture*, surat kabar Belanda seperti *De Locomotief* dan *De Preangerborde* yang dihimpun dari situs *delpher* serta foto-foto kaitanya dengan *Java Instituut* yang didapat dari situs KITLV. Selain itu, sumber-sumber sekunder seperti buku dan artikel juga turut digunakan untuk mendukung data penelitian. Kemudian sumber-sumber tersebut dilakukan verifikasi dengan dasar tahun penerbitan sumber. Kemudian, sumber terseleksi dilakukan interpretasi atau penafsiran untuk menghasilkan fakta sejarah. Setelah diperoleh segenap fakta, kemudian dilakukan historiografi dalam bentuk artikel ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kongres Kebudayaan Jawa I (1918): Gagasan tentang Pembentukan *Java Instituut*

Kebudayaan Jawa pada hakikatnya memiliki sub pembagian yang luas. Namun, pandangan sebagian besar masyarakat selalu tertuju pada Jawa Mataram. Bukan tanpa alasan, Jawa *Mataraman* masih mendominasi tata etik kebanyakan masyarakat Jawa hingga saat ini. Implikasinya, Yogyakarta dan Surakarta masih dianggap sebagai pusat pertumbuhan kebudayaan Jawa. Upaya pemerhatian budaya Jawa mulai serius ditunjukkan semenjak awal abad ke-20. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan Budi Utomo di Surakarta yang banyak memberikan pengaruh terhadap meningkatnya simpati golongan intelektual pada kebudayaan. Sejalan dengan tulisan Ferdiyanah (2017), yang menjabarkan jika Adipati Mangkunegara VII berperan besar terhadap aksi tanggap budaya dan melestarikan eksistensinya. Oleh karena itu, berkat bantuan tokoh lain seperti Dr. Radjiman, Mangkunegara VII memprakarsai sebuah perkumpulan yang bernama Komite Pengembangan Kebudayaan Jawa. Komite yang diketuai oleh Prangwadono (nama asli Mangkunegara VII) inilah yang pertama kali mengusulkan tentang pelaksanaan Kongres Kebudayaan Jawa. Pada awalnya, usulan tentang penyelenggaraan kongres ini cukup berkecil, mengingat hegemoni pemerintah Hindia-Belanda di masa itu cukup besar. Belanda mengusulkan agar kongres yang diselenggarakan adalah Kongres Bahasa Jawa, sementara intelektual Budi Utomo Surakarta menghendaki bahwa Kongres Kebudayaan Jawa yang diselenggarakan. Untuk menyikapi perselisihan ini, diambil jalan tengah dengan mengikuti usulan intelektual lokal tentang tema kongres, serta kegiatan kongres melibatkan intelektual non-pribumi sebagai penasihat (Supardi, 2013)

Dalam beberapa surat kabar Belanda dengan angka tahun 1918, istilah Komite Pengembangan Budaya Jawa masih digunakan dengan menggunakan bahasa Belanda menjadi "*Comittee voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*" sebelum kemudian berubah menjadi *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*. Kongres Kebudayaan Jawa pertama ini dilakukan pada tanggal 5-6 Juli (ada pula yang menyebutkan hingga tanggal 7) tahun 1918 di Kota Surakarta. Bahkan, sebelum dilaksanakannya kongres, panitia telah mengumumkan melalui surat kabar pemerintah Hindia-Belanda. Berbagai persiapan juga dilakukan secara matang seperti wacana

mendatangkan sosok “ibu” dari Jawa untuk menyuarakan hak perempuan di dalam kongres, pendalaman mosi bagi peserta kongres, hingga Pura Mangkunegaran yang mempersiapkan pertunjukan wayang wong dengan lakon *pregiwa-pregiwati* untuk peserta kongres. Persiapan kongres tersebut dikabarkan dalam kutipan surat kabar *De Indiër*, Mei, 1918 sebagai berikut;

Het te Solo gevestigde Comité voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling stelt zich voor, op 5 en 6 Juli a.s. te Solo--- // Z. Stokvis te Semarang en Tjipto Mangoenkoesoemo te Solo hebben zich welwillend bereid verklaard een preadvies uit te brengen. Nederlandsch zal de voermaat van het congres zijn. // Op een der congresdagen zal ini Poera Mangkoenegara voor de deelnemers aan het congres eene wajang wong-voorstelling plaats hebben van het Janvaanesche Pregiwo-Pregiwati.

Komite Pengembangan Kebudayaan Jawa, yang didirikan di Solo, mengusulkan untuk mengadakan konferensi di Solo pada tanggal 5 dan 6 Juli // Z. Stokvis di Semarang dan Cipto Mangunkusumo di Solo telah sepakat untuk memberikan saran awal. Belanda akan menjadi pembicara konferensi tersebut. // Pada saat konferensi, akan diadakan pertunjukan wayang wong Jawa dengan cerita Pregiwa-Pregiwati di Pura Mangkunegaran untuk para peserta konferensi (*De Indiër*, 1918).

Kongres Kebudayaan Jawa I ini diselenggarakan dengan melibatkan setidaknya lima puluh delegasi asosiasi dari seluruh Jawa (termasuk Madura, Bali dan Sunda) serta pemerintah Hindia-Belanda. Menurut catatan Hesse (2006); dalam Supardi (2013), kongres ini dihadiri oleh dua ratus orang yang berkumpul di Bangsal Kepatihan Pura Mangkunegaran. Raden Sastrowidjono sebagai ketua kongres yang juga anggota dari Komite Pengembangan Kebudayaan Jawa memimpin jalannya kongres bersama beberapa petinggi yang lain (lihat gambar 1). Adapun mosi kongres menyoal tentang pandangan dan identitas kebudayaan Jawa serta arah pendidikan masyarakat Jawa. Beberapa rumusan mendasar mosi selama kongres telah dituliskan di dalam koran (*De Indiër*, 1918). *Sejauh mana pendidikan berbasis Barat diperlukan bagi perkembangan masyarakat Jawa? Ilmu dan metode Barat manakah yang paling mungkin diajarkan pada perkembangan masyarakat Jawa? Sejauh mana budaya Jawa hidup dalam jiwa dapat menjadi landasan pendidikan masyarakat Jawa?* Mosi tersebut memunculkan berbagai wacana intelektual, baik dari sisi orientalis pribumi maupun barat. Beberapa tokoh seperti Soerjokoesoemo, Satiman Wirjosandjojo, Cipto Mangunkusumo, Radjiman Wedyodiningrat, Notosoedirdjo (tokoh lokal) dan Rottier, Z. Stokvis Van Hindloopen Labberton, Muhlenfeld (intelektual kolonial) mengutarakan pendapatnya masing-masing tentang kebudayaan Jawa (*De Locomotief*, 1919). Bahkan, di dalam jalannya kongres juga terjadi perdebatan di antara tokoh-tokoh untuk mempertahankan argumentasi idealisnya.



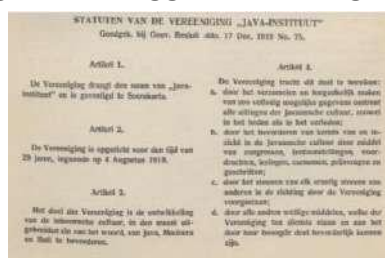
Gambar 1. Anggota Panitia dan Pemakalah Kongres Kebudayaan Jawa 1918
(sumber: KITLV, 1918)

Meskipun terkesan berjalan begitu rumit, kongres telah menghasilkan berbagai keputusan. Salah satunya usulan Z. Stokvis tentang upaya pemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi bumi putera harus dilakukan untuk menciptakan masyarakat Jawa yang berkesadaran budaya (De Priangerbode, 1918). Selain itu, yang tidak kalah penting adalah keputusan di akhir kongres yang menyetujui pembentukan lembaga pengkajian kebudayaan. Gagasan ini dipandang penting untuk menyelamatkan kebudayaan Jawa dengan menjadikannya objek kajian ilmu pengetahuan yang kompleks (Kristiyanto, 2018). Usulan pembentukan lembaga ilmiah yang diutarakan Adipati Mangkunegara VII mendapatkan kesepakatan bulat dari seluruh peserta kongres. Begitu pentingnya lembaga ini, sehingga maju sebagai mosi pada kongres berikutnya, yakni Kongres Kebudayaan Jawa 1919. Namun, sebelum diselenggarakan kongres, sebagai tindak lanjut dari keputusan kongres sebelumnya, golongan intelektual terlebih dahulu melakukan pertemuan di Gedung Mataram, Yogyakarta untuk mewujudkan wacana kaitannya dengan pendirian lembaga pengkajian budaya Jawa tersebut (Fauzi et al., 2023). Lantas, lembaga itu diberi nama *'Java Instituut'* yang berpusat di kota Surakarta. Pada bulan yang sama dengan penyelenggaraan kongres, *Java Instituut* telah disahkan oleh pemerintah Hindia-Belanda dan mendapatkan AD/ART. Keputusan ini dikabarkan di dalam koran Belanda dengan judul rubrik *"Java Instituut"*.

Bij governementsbesluit zijn de statuten vereniging "Java Instituut" te Soerakarta goedgekeurd en die vereniging is mitsdien als rechtspersoon erkende.

Dengan keputusan pemerintah, anggaran dasar perkumpulan *"Java Institute"* di Surakarta telah disetujui dan dengan demikian perkumpulan tersebut diakui sebagai badan hukum (De Locomotief, 1919).

Kutipan rubrik tersebut menunjukkan meskipun sudah mendapatkan perhatian semenjak kongres pertama, *Java Instituut* baru mendapatkan legalitas penuh dari pemerintah Hindia-Belanda dalam kurun satu tahun. Dengan munculnya surat pengesahan itu, maka tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Kebudayaan Jawa (*Comittee voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*) sepenuhnya dilimpahkan kepada *Java Instituut* sebagai lembaga resmi. Termasuk penyelenggaraan kongres-kongres di tahun-tahun setelahnya. Kongres Kebudayaan Jawa II digelar pada 1919, tepatnya di bulan Desember. Adapun penyelenggara kongres ini adalah *Java Instituut* itu sendiri. Bahkan, beberapa anggota kongres menyebut kongres II ini sebagai *Congres van het Java Instituut*, yang artinya kongres dari *Java Instituut*. Adapun pembahasan kongres meliputi sejarah dan kebudayaan Jawa, Madura dan Bali. Sampai saat ini tidak ditemukan secara jelas tentang berlangsungnya kongres, tapi dari kongres ini dapat diketahui beberapa catatan pemerintah Belanda tentang *Java Instituut*. Sebagai salah satu lembaga di bawah pemerintah kolonial Belanda di Batavia, *Java Instituut* terikat secara resmi oleh undang-undang pemerintah. Sesuai dengan AD/ART yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda nomor 75 tahun 1919 (lihat gambar 2). Setidaknya *Java Instituut* harus patuh terhadap 11 pasal yang mengatur dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan lembaga.



Gambar 2. AD/ART Java Instituut no 75 tahun 1919

(sumber: Majalah Djawa, 1921)

Dari 11 pasal yang ada di dalam AD/ART *Java Instituut* diperoleh beberapa informasi tentang kelangsungan *Java Instituut*. Seperti pada pembahasan sebelumnya, *Java Instituut* memiliki kantor pusat di Surakarta. Pemilihan Surakarta kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor tempat diselenggarakannya kongres pertama dan penggagas pertama *Java Instituut* yakni Mangkunegara VII. *Java Instituut* selain mendapatkan dana dari pemerintah di Batavia, juga disponsori setidaknya oleh empat kerajaan di *Vorstenlanden* (Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegara dan Paku Alam) (Supardi, 2013). Faktor ini memperbesar peluang bagi Surakarta/Solo dalam mengupayakan kemajuan kebudayaan. Kemudian yang menjadi penting untuk disoroti adalah pihak Belanda memberikan batasan berdirinya lembaga ini selama 29 tahun. Artinya, batas berdirinya *Java Instituut* hingga tahun 1948. Namun, mengacu pada Majalah Djawa yang merupakan majalah terbitan *Java Instituut*, angka tahun terakhir penerbitan berhenti pada 1940. Hal ini sesuai jika dikontekskan pada periode Jepang di mana, Kebijakan Jepang di Indonesia membatasi habis segala pengaruh Belanda (Sinaga et al., 2024). Pasal selanjutnya dari AD/ART ini menjabarkan tujuan utama *Java Instituut* yakni mengembangkan kebudayaan Jawa secara luas. Maksud dan tujuan perhimpunan ini ialah untuk mengembangkan kebudayaan pribumi dalam arti yang seluas-luasnya dari Jawa, Madura dan Bali (Majalah Djawa, 1921). Sementara pasal lain mengatur tentang keanggotaan *Java Instituut*.

Kiprah *Java Instituut* di dalam Pemajuan Kebudayaan Jawa

Berdasarkan AD/ART pasal 3 *Java Instituut* yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, tujuan utama pembentukan lembaga ini mutlak untuk menentukan arah perkembangan budaya Jawa. Urgensi pemajuan kebudayaan Jawa didasarkan pada perlunya perhatian khusus terhadap kondisi kebudayaan tersebut, mengingat pada periode sebelumnya kebudayaan Jawa dipandang mengalami kemerosotan identitas. Sebenarnya, pemajuan budaya oleh *Java Institut* cukup komprehensif. Definisi “Jawa” disini dimaknai tidak hanya sekadar kebudayaan Jawa yang berpusat pada keraton, melainkan mencakup Sunda, Madura bahkan Bali. Namun, di dalam sub-pembahasan ini fokus yang akan diteliti secara mendalam kaitannya dengan kiprah *Java Institut* dalam pemajuan budaya Jawa adalah autentik (Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur). Peran *Java Instituut* dalam pemajuan kebudayaan dilakukan melalui beberapa program seperti penyelenggaraan kongres, pengkajian hingga pencatatan hasil kajian budaya, pameran, pagelaran tari dan wayang, penerbitan majalah dan buku serta pendirian pusat-pusat kebudayaan seperti museum dan lembaga pendidikan (Ferdiyanah, 2017). Upaya-upaya ini tentu saja menjadi ajang promosi *Java Instituut* dalam mengenalkan kebudayaan Jawa secara meluas.

Salah satu upaya pemajuan kebudayaan adalah melalui penyelenggaraan kongres kebudayaan. Selama berdirinya atau sepanjang tahun sebelum kemerdekaan, *Java Instituut* setidaknya melaksanakan kegiatan kongres kebudayaan sebanyak enam kali secara berturut-turut, yakni pada tahun 1919, 1921, 1924, 1926, 1929, dan 1937 (Supardi, 2013). Di dalam Lima kongres terakhir, unsur budaya Jawa selalu dibawa sebagai bahan diskusi. Di tahun 1921 kebudayaan Jawa yang dibahas kaitannya dengan musik Jawa dan tantangan musik Jawa akan pengaruh Barat. Kemudian pada tahun 1924, unsur yang dijadikan pembicaraan adalah monumen Jawa kuno. Hasil kebudayaan berupa bangunan kuno turut menjadi perhatian khusus *Java Instituut*, sebab sebagai tinggalan sejarah, bangunan seperti Candi Prambanan dan Borobudur memerlukan perlakuan tersendiri agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan.

Pelaksanaan kongres budaya 1924 ini diberitakan di dalam koran *Algemeen Handelsblad* sebagai berikut.

Van 24 tot 27 December zal te Djokjakarta een congres van het Java Instituut plaats hebben. // Avonds inleidingen en debat betreffende de vraag: "Welke waarde bobben de oud-Javaansche monumenten voor de huidige toekomstige Javaansche cultuur"

Konferensi Java Institute akan berlangsung di Yogyakarta dari tanggal 24 hingga 27 Desember. // Perkenalan dan debat malam hari mengenai pertanyaan: "Apa nilai monumen Jawa kuno bagi kebudayaan Jawa saat ini dan masa depan" (*Algemeen Handelsblad*, 1924)

Begitupun pada kongres-kongres setelahnya, kebudayaan Jawa masih terus menjadi mosi diskusi. Kongres 1926 yang dilaksanakan di Surabaya, menyoal tentang kebudayaan Jawa Timur. Jawa Timur sebagian besar wilayahnya masih terpengaruh kebudayaan Jawa *Mataraman* dan Jawa *Arekan* (Sutarto & Sudikan, 2008). Oleh karena itu, berbagai unsur budaya seperti bahasa, entis dan kondisi geografi turut menjadi konsen diskusi. Setelah tiga tahun berselang, kongres kebudayaan dilaksanakan kembali di Surakarta pada 1929. Kongres ini digelar sekaligus sebagai peringatan 10 tahun berdirinya *Java Instituut*. Berlangsungnya kongres berisikan rangkaian kegiatan budaya dan ilmiah, seperti pameran hasil kerajinan tangan serta wacana pendirian pendidikan tinggi. Kongres 1937 dilaksanakan di Bali dan sedikit membahas budaya Jawa. Pemajuan kebudayaan Jawa melalui kongres merupakan upaya yang bijak. Sebagai topik pembahasan di kalangan intelektual, nasib kebudayaan Jawa menunjukkan adanya titik balik yang positif dalam upaya pelestarian dan pemajuannya. Sebagaimana tulisan Abdullah (2014), yang menyebutkan jika peran intelektual berpengaruh pada sebuah perkembangan budaya.

Upaya giat budaya Jawa oleh *Java Instituut* juga dilakukan melalui pengkajian terhadap sejarah, budaya dan bahasa Jawa. Sebagai lembaga ilmiah, tugas utama *Java Instituut* berpusat untuk mendalami aspek-aspek budaya Jawa. Penggalan sumber-sumber data tentang budaya Jawa dilakukan oleh orientalis barat dan juga bumi putera. Upaya ini telah dilakukan dari awal pengesahan *Java Instituut* sampai data terakhir Majalah Djawa pada 1940. Adapun penelitian tentang kebudayaan Jawa cenderung menysar pada aspek seperti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha berupa candi, relief, arca bahkan folklore. Hasil peninggalan kebudayaan Jawa kuno menjadi objek yang paling banyak diteliti oleh Belanda karena keunikan dan keotentikannya (Arifin, 2018). Bukti akan hal ini dapat dilihat pada artikel penelitian yang ditulis oleh J. Kats yang dimuat majalah Djawa edisi 1924 tentang lakon wayang *Kresna Goegah* (Krisna Gugah) (lihat gambar 3) yang merupakan bentuk pendalaman cerita-cerita pewayangan. Selain itu, kajian-kajian tentang Jawa yang diterbitkan melalui Majalah Djawa membahas tentang etnologi masyarakat Jawa dari segi gaya berpakaian, kesenian, agama, perbandingan bahasa hingga mistisme yang mengakar di dalam masyarakat. Upaya pengkajian terhadap budaya Jawa dapat dipandang sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan, karena hasil penelitian tersebut berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, terlebih ketika temuan-temuan tersebut dipublikasikan melalui media massa.



Gambar 3. Hasil Penelitian Kats dimuat di Majalah Djawa tentang Lakon Wayang
(sumber: Majalah Djawa, 1924)

Perkembangan seni pertunjukan di abad ke-20 menjadi salah satu bentuk keberhasilan *Java Instituut* dalam menyebarkan kebudayaan Jawa. Seni pertunjukan selain sebagai hiburan yang dapat dinikmati masyarakat secara khalayak, tentunya berperan menjadi media promosi atas sebuah gagasan (Sujarno et al., 2003). Begitupun, sebagai upaya memajukan kebudayaan Jawa, seni pertunjukan banyak digelar untuk mempertontonkan kesan adiluhung budaya Jawa. Pagelaran seni pertunjukan sering diselenggarakan pada acara-acara formal seperti kongres kebudayaan serta panggung hiburan bagi masyarakat umum. Dalam memajukan kesenian, *Java Instituut* menggandeng asosiasi-asosiasi kesenian di sekitar *Vorstenlanden* untuk diberikan edukasi khususnya bagi seniman-seniman muda. Salah satu asosiasi yang dibina oleh *Java Instituut* adalah Kridha Beksa Wirama. Kridha Beksa Wirama merupakan asosiasi kesenian yang didirikan oleh Pangeran Tejakusuma (HB VII) pada 1918. Kemudian pengelolaannya sempat diambil oleh *Java Instituut* dalam rangka penelitian dan pelatihan intensif kepada seniman dalam hal penyelenggaraan pentas untuk keperluan kongres. Seni Pertunjukan yang mendapatkan perhatian *Java Instituut* adalah seni tari, seni drama tradisional serta wayang kulit. Seni drama tradisional seperti wayang wong sering digelar *Java Instituut* melalui pertunjukan-pertunjukan eksklusif maupun populis (lihat gambar 4). Maka tidak berlebihan jika Soedarsono (1997) menggambarkan pada pertengahan abad ke-20 wayang wong Yogyakarta dan Surakarta mencapai puncak keemasan. Begitupun di Jawa Timur, kesenian Ludruk turut mengalami kejayaan di pertengahan abad-20. Hal ini dibuktikan banyak munculnya kelompok-kelompok Ludruk seperti kelompok Ludruk Cak Durasim (Zuhriyyah, 2018).



Gambar 4. Pagelaran Wayang Wong Lakon Hanoman oleh Java Instituut
(sumber: Majalah Djawa, 1930).

Pemajuan budaya Jawa juga dilakukan *Java Instituut* melalui media massa, khususnya majalah. Semenjak berdiri dan disahkan 1919, berselang dua tahun kemudian tepatnya pada 1921, *Java Instituut* berhasil menerbitkan majalah edisi pertamanya yang diberi nama *Majalah Djawa*. Ditinjau dari angka tahun penerbitannya, majalah *Djawa* mengalami eksistensi hingga 2 dekade. Hal ini dapat dilihat dari indeks majalah yang dibagi menjadi dua periode yakni periode 1921-1930

dan 1931-1940. Dalam dua dekade tersebut, *Java Instituut* setidaknya menghasilkan 94 volume publikasi majalah sehingga dalam satu tahun, *Java Instituut* mampu melakukan penerbitan 4 hingga 5 kali. Majalah Djawa berkontribusi besar dalam menyebarluaskan ide dan gagasan hasil pemikiran intelektual tentang budaya Jawa. Kendati media semacam koran dan majalah di paruh awal abad 20 menjadi sarana di dalam mengobarkan semangat nasionalisme (Tusaddiah et al., n.d.). Namun dibalik itu, majalah-majalah seperti Djawa memiliki maksud di dalam memberikan edukasi kebudayaan untuk memancing rasa tanggap budaya, khususnya kebudayaan Jawa. Selain majalah Djawa, *Java Instituut* juga sempat menerbitkan majalah Poesaka. Majalah Poesaka berkembang menjadi *Poesaka Soenda*, *Poesaka Madura*, dan *Poesaka Djawi*. Namun, tidak berlangsung cukup lama, Poesaka Sunda dan Madura harus diberhentikan karena kendala pengelolaan penerbitan serta karena *Java Instituut* ingin memfokuskan pada pengembangan pada Majalah Djawa. Sedangkan Poesaka Djawi masih dapat bertahan (Supardi, 2013). Sama halnya dengan Majalah Djawa, *Poesaka Djawi* memiliki rubrik-rubrik yang erat dengan kebudayaan Jawa khususnya terkait bahasa Jawa. Majalah *Poesaka Djawi* merupakan majalah berbahasa Jawa yang memberitakan kegiatan seputar *Java Instituut* dalam bahasa Jawa khas Yogyakarta. Berikut sedikit kutipan majalah *Poesaka Djawi* tentang kongres kebudayaan Jawa 1924.

Konggrès Yapa Insêtitut ing Ngayogyakarta. Wiwit surya kaping 24 dumugi 27 Dhesèmber 1924.

Kongres *Java Instituut* di Yogyakarta dari pagi tanggal 24 sampai 27 Desember 1924 (Majalah *Peoesaka Djawi*, 1924)

Usaha Jawa *instituut* juga diwujudkan melalui pembangunan fasilitas-fasilitas kebudayaan seperti lembaga pendidikan dan museum. Di bidang pendidikan, *Java Instituut* berhasil mendirikan sekolah kerajinan seni yang disebut *Kunst Ambachtschool*. Dari pemaparan berita di dalam koran *Bataviaasch Nieuwsblad* (1937), rencana pendirian sekolah kesenian ini akan dilakukan di Yogyakarta. *Kunst Ambatschschooll* didirikan dengan maksud agar dapat menjadi wadah bagi yang ingin mendalami kesenian dan kerajinan. Untuk memudahkan akses dengan kesenian, di dalam surat kabar tersebut dijelaskan jika *Java Instituut* akan membanggunya dekat dengan museum Sonobudoyo yang telah didirikan beberapa tahun sebelumnya. Wacana lain tentang sekolah kesenian ini akan dibangun berbentuk asrama. Sedangkan fasilitas budaya yang berhasil didirikan *Java Instituut* adalah Museum Sonobudoyo itu sendiri. Pembangunan Museum Sonobudoyo oleh *Java Instituut* didukung penuh oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Sebagai pelindung kesenian, Sultan HB VIII menyadari jika budaya Jawa harus diarsipkan dengan rapi (Purwadi, 2003) Museum Sonobudoyo didirikan oleh *Java Instituut* pada tahun 1934 (Kristiyanto, 2018). Kristianto juga menjabarkan jika Museum Sonobudoyo memiliki berbagai koleksi bertema budaya Jawa. Museum Sonobudoyo menggambarkan berkembangnya budaya Jawa melalui visi penyelamatan yang baik. Lihat kutipan surat kabar yang menunjukkan jika *Java Instituut* sebagai lembaga yang mempionir berdirinya Museum Sonobudoyo.

Op 21 Januari 1930 werd gunstig op dit rekest beschikt en in den loop van het jaar 1930 werd het Java Instituut een bedrag van f 25.143. Het dagelijks bestuur van het Java Instituut benoemde onverwijld een museum-commissie welke over een te stichten museum dampoort zou brengen.

Pada tanggal 21 Januari 1930, permohonan ini disetujui dan selama tahun 1930 *Java Institute* menerima sejumlah 25.143 gulden. Pengurus *Java Institute* segera menunjuk panitia museum yang akan bertanggung jawab mendirikan museum (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1941).

Menurut berbagai sumber seperti yang diutarakan oleh Supardi (2013), *Java Instituut* juga secara berkala mengadakan kegiatan akademis yang tentunya masih berada pada koridor

kebudayaan Jawa. kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dikemas dalam satu rangkaian acara. Beberapa kegiatan seperti pameran, diskusi ilmiah hingga bedah buku sering dilakukan oleh *Java Instituut* untuk mendiseminasi hasil-hasil temuan terbaru. Kegiatan pameran yang dilakukan *Java Instituut* dilakukan di berbagai kota sesuai dengan tempat pelaksanaan kongres terakhir. Pameran ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan hasil karya baik tulis maupun kerajinan yang telah dikembangkan oleh *Java Instituut* (lihat gambar 5).



Gambar 5. Pameran *Java Instituut* di Surabaya
(sumber: KITLV, 1926).

Peran dan Kontribusi Tokoh Lokal di dalam *Java Instituut*

Sebagai bagian dari representasi penerapan politik etis, maka salah satu indikator utama yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan bumi putera di dalam lembaga ini. Sederhananya, politik etis merupakan politik ‘balas budi’ Belanda kepada bumiputera. Dengan demikian, seyogyanya sasaran utama dari politik etis adalah masyarakat bumiputera itu sendiri. Pada permulaanya, *Java Instituut* merupakan perkumpulan anggota Budi Utomo Surakarta yang prihatin dan simpati terhadap kebudayaan Jawa. Namun, pengesahan lembaga *Java Instituut* oleh Hindia-Belanda memunculkan aturan baru yang lebih formal dan baku tentang keanggotaan. Peraturan ini terdapat pada pasal 5 AD/ART *Java Instituut* dengan bunyi seperti di bawah ini.

De Vereeniging bestaat uit gewone leden, ereleden, corresponderende leden en begunstigers. Verenigingen en instellingen van welken aard ook kunnen als leden of begunstigers tot de Vereeniging toetreden.

Perhimpunan terdiri atas anggota-anggota biasa, anggota kehormatan, anggota dengan surat-menysurat dan sebagai penyumbang. Perkumpulan-perkumpulan, Badan-badan bersifat apapun dapat masuk sebagai anggota atau penyumbang atau simpatikan (Majalah Djawa, 1921)

Namun, di pasal 7 dijelaskan lebih lanjut jika anggota biasa dengan anggota kehormatan sama-sama memiliki peluang untuk mendapatkan jabatan sebagai pengurus. Anggota biasa terdiri dari penduduk lokal dan juga pihak kolonial. Begitupun, anggota kehormatan juga berasal dari dua kelompok tersebut tapi memiliki posisi tinggi di stratanya masing-masing. Hal ini menunjukkan *Java Instituut* memberlakukan kesetaraan bagi anggotanya tanpa melakukan segregasi rasial yang kuat. Dapat diduga hal ini terjadi karena anggota dari *Java Instituut* berisikan akademisi yang memiliki pandangan maju dan telah memahami kesetaraan sosial.

Intelektual bumiputera memiliki peranan penting di dalam *Java Instituut*. Tokoh-tokoh penting yang dimaksud telah memberikan kontribusi di dalam pembentukan hingga penyelenggaraan lembaga. Pertama, adalah Mangkunegara VII sebagai penggagas kongres kebudayaan yang menjadi cikal bakal berdirinya *Java Institut*. Mangkunegara VII memiliki jabatan

sebagai anggota kehormatan sehingga perannya begitu besar. Sebagai pemimpin Kadipaten Pura Mangkunegaran, Mangkunegara VII memiliki jasa di dalam menyumbangkan sebagian dari harta keraton untuk dana operasional *Java Instituut*. Hal ini bersamaan juga dengan tiga kerajaan lain yakni Yogyakarta, Surakarta dan Pakualaman (Supardi, 2013). Lebih jauh lagi, sebagai tempat penyelenggaraan kongres, Pura Mangkunegaran juga menyumbangkan kontribusi di dalam pembentukan *Java Instituut*. Beberapa akomodasi seperti kereta, makan, serta pagelaran wayang wong tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Namun, semua mereka sediakan untuk seluruh peserta dalam kongres tersebut. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan mengingat Mangkunegara VII memiliki kecintaan yang tinggi terhadap budaya Jawa (Ferdiyanah, 2017).

Tokoh lain yang tidak kalah memiliki kontribusi yang besar di dalam *Java Instituut* adalah Dr. R. Hoesein Djajadiningrat dan R. Sastrowidjono. Sebagai pengurus inti dari *Java Instituut* di era awal, kontribusi dua tokoh ini begitu berharga. Berbagai ide-ide dan gagasan yang muncul dari tokoh Hoesein dan Sastrowidjono menjadi acuan dalam arah pemajuan kebudayaan Jawa di dalam *Java Instituut*. Dr. R. Hoesein Djajadiningrat sebagai anggota kehormatan *Java Instituut* selalu memberikan gagasan-gagasan terbaru tentang kebudayaan. Selayaknya yang terjadi pada kongres kebudayaan tahun 1929 di Solo, Profesor Hoesein Djajadiningrat menyampaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh *Java Instituut* kaitannya masalah penerbitan majalah Poesaka yang kurang maksimal. Oleh karena itu, di dalam kongres itu juga Profesor Hoesein menawarkan solusi untuk memusatkan semua publikasi *Java Instituut* pada majalah Djawa saja. Hal ini dirasa paling bijak untuk menghemat biaya sekaligus efisiensi kerja. Dari sini dapat dilihat bahwa Prof. Hoesein merupakan tokoh yang kritis dan solutif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Razy et al. (2022), yang menyatakan jika Hoesein Djajadiningrat memiliki pandangan maju tentang konsep-konsep budaya Jawa. Begitupun Sastrowidjono, mengemban jabatan ketua kongres, membuatnya selalu memberikan pandangan baru terhadap kebudayaan Jawa. Ide-ide baru yang disampaikannya menjadi bahan diskusi di setiap kongres (De Priangerbode, 1918).

Selain di dalam kepengurusan inti, peran tokoh lokal di dalam *Java Instituut* dapat dilihat melalui beberapa kongres dan penerbitan majalah. Di dalam penyelenggaraan kongres, intelektual dari golongan bumi putera mendapatkan hak yang sama untuk menyampaikan makalah dan argumennya. Di dalam kongres pertama, beberapa tokoh tampil dengan segudang argumen yang kuat. Tokoh penting seperti Cipto Mangunkusumo dan Radjiman turut menjadi pemrasaran. Sedangkan, beberapa anggota biasa seperti Satiman Wirdjosandjojo dan Soetatmo Soerjokoesoemo menunjukkan bahwa anggota biasa yang juga tokoh lokal diposisikan setara dengan intelektual kolonial yang lain. Sedangkan, di dalam kongres ketiga tahun 1924 tokoh-tokoh lokal selalu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan mosi terlebih dahulu. Mengangkat tema kongres yakni musik Jawa, menjadikan beberapa tokoh seperti Djojodipoero, Nyonyah S, RMA. Soerjo-Poetro berkesempatan menanggapi mosi di awal kongres. Nama-nama intelektual lokal juga muncul di dalam majalah Djawa. Majalah terbitan pertama, beberapa intelektual lokal yang muncul adalah K.R.T. Djojodipoero, R.M.T.A. Soerjopoetro dan R.M. Wreksodiningrat. Realitas ini menunjukkan birokrasi *Java Instituut* tidak memisahkan antara masyarakat lokal dan kolonial.

SIMPULAN

Java Institut merupakan lembaga ilmiah yang diprakarsai oleh Adipati Mangkunegara VII. Pada awalnya, berupa kumpulan dengan nama Komite Pengembangan Budaya Jawa. Komite ini menggelar sebuah kongres yang disebut sebagai Kongres Kebudayaan Jawa I (1918). Kongres I ini menjadi dasar munculnya gagasan pembentukan *Java Instituut* yang kemudian disetujui oleh anggota kongres. *Java Instituut* baru mendapatkan pengesahan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada Desember 1919 melalui AD/ART no 75 tahun 1919. Dengan demikian, *Java Instituut* sebagai lembaga ilmiah resmi di bawah pemerintah pusat di Batavia. Di dalam memajukan kebudayaan Jawa, *Java Instituut* melakukan berbagai program seperti kongres kebudayaan hingga 6 kali, penelitian dan penerbitan objek budaya Jawa, penyelenggaraan kesenian berupa wayang wong, penerbitan majalah *Djawa dan Poesaka*, pendirian sekolah *Kunst Ambachtstsschool* dan Museum Sonobudoyo serta membuat forum-forum ilmiah. Peranan tokoh lokal di dalam *Java Instituut* begitu besar. Beberapa tokoh seperti Mangkunegara VII, Hoesain Djajadiningrat, Sastrowidjojo, Cipto Mangunkusumo, Radjiman dan anggota peserta biasa di dalam kongres maupun majalah menunjukkan jika birokrasi *Java Instituut* tidak memandang rasial. Hal ini ditunjukkan dari posisi masyarakat lokal yang setara dengan anggota orientalis Belanda.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. (2017). *Ethical Politic and Emergence of Intellectual Class. Paramita: Historical Studies Journal*, 27(1), 37–49.
- Abdullah, M. (2014). Pribumisasi Islam dalam Konteks Budaya Jawa dan Integrasi Bangsa. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 4(1), 67–90. <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1553>
- Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. (2020). Pendidikan pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900-1930. *Jurnal Artefak*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3038>
- Algemeen Handelsblad*. (1924). *Congres van het Java-Instituut*. 11-05-1924.
- Arifin, H. P. (2018). Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(1), 65–76. <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1034>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses 12 Juli 2025. <https://Kbbi.kemdikbud.Go.Id/>.
- Bataviaasch Nieuwsblad*. (1937). *Kunstambatschool*. 18-11-1937.
- Bataviaasch Nieuwsblad*. (1941). *Sana Boedaja*. 22-2-1941.
- De Indiër*. (1918). *Comité voor Javaansche Cultuurontwikkeling*. 15-5-1918.
- De Locomotief*. (1919). *Java Instituut*. 4-12-1918.
- De Priangerbode*. (1918). *Congres voor Javaansche Cultuurontwikkeling*. 8-7-1918.
- Fauzi, R., Wijayanti, E., & Yulianti, I. (2023). *Java Instituut: Implementasi Intelektual Lokal dan Kolonial dalam Memajukan Kebudayaan Sunda 1921-1941. FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 12(2), 219–232.
- Ferdiyanah, S. N. H. (2017). Peranan Mangkunegara VII dalam Mengembangkan Kebudayaan Jawa 1918-1942. *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(2), 309.
- Gandhi, L. (2018). *Postcolonial Theory: A Ciitical introduction*. Columbia University Press.
- Jordan, R. (2016). *Nicolaus Engelhard and Thomas Stamford Raffles: Brethren in Javanese Antiquities. Indonesia*, 101, 39. <https://doi.org/10.5728/indonesia.101.0039>

- KITLV. (1918). *Congres van het Java Instituut*.
- KITLV. (1926). *Stand van het Java-Instituut op de jaarmarkt te Soerabaja*.
- Kristiyanto, A. (2018). Melihat Java-Instituut. In *Sejarah dan Identitas Kesitimewaan Sonobudoyo* (pp. 15–22). Museum Sonobudoyo.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Kencana. pp. 69-80.
- Majalah Djawa. (1921). *Statuten van De Vereeniging Java Instituut*. Java Insituut.
- Majalah Djawa. (1924). *Konggrès Yapa Insêtitut Ing Ngayogyakarta*.
- Majalah Djawa. (1930). *Kresna Goegah*.
- Majalah Peoesaka Djawi. (1924). *Konggrès Yapa Insêtitut Ing Ngayogyakarta*. Java Instituut.
- Poesponegoro, M. D., Notosusanto, N., Kartodirdjo, S., Leirissa, R. Z., & Soejono, R. P. (2023). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Balai Pustaka. Pp.133.
- Purwadi, P. (2003). *Jasa Sri Sultan Hamengku Buwono I-X dalam Memakmurkan Rakyat*. Krakatau Press. Pp. 186.
- Razy, M. R. O. A., Sofianto, K., & Jaelani, G. A. (2022). Visi Orientalisme Hoesein Djajadiningrat dalam Ilmu Pengetahuan dan Pemajuan Identitas Kebudayaan (1911-1960). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 5(2), 97–106.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Sinaga, R., Sinurat, G. J. F., Aulia, T., & Manurung, N. K. (2024). Kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 379–388.
- Soedarsono. (1997). *Wayang Wong: Drama Tari Ritual Kenegaraan Di Keraton Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press.
- Sujarno, Ariani, C., Munawaroh, S., & Suyami. (2003). *Seni Pertunjukkan Tradisional: Nilai, Fungsi dan Tantangannya*. Tiara Kencana. pp. 54.
- Sultani, Z. I. M., & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan dan Pelaksanaan Pendidikan di Zaman Kolonial Belanda di Indonesia Abad 19-20. *Jurnal Artefak*, 7(2), 91. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i2.3518>
- Supardi, N. (2013). *Bianglala Budaya Rekam Jejak 95 tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013*. Direktorat Jenderal Kebudayaan. pp. 19-52.
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403–416. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531>
- Sutarto, A., & Sudikan, S. Y. (2008). *Pemetaan Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur: Sebuah Upaya Pencarian Nilai-Nilai Positif*. Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Kompyawisda Jatim.
- Tusaddiah, H., Simamora, P. L., Adinda Ginting, A. A., & Sinaga, R. (n.d.). Peran Pers dalam Penyebaran Gagasan dan Pemikiran Intelektual Masa Pergerakan Nasional Indonesia di Sumatera Utara. *Rosmaida Sinaga INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4, 7205–7218.
- Zuhriyyah, M. (2018). Kelompok Ludruk Cak Durasim (Ludruk Organisatie) di Surabaya Tahun 1933-1945. *KAGANGA: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 1(2), 93–106. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v1i2.414>